

Tinjau Ulang SP3

Riam Merasap

Seenaknya saja mengeluarkan SP3 padahal hasil mega-proyek nihil. BPKP menyatakan terlalu dini tanpa masalah. BPK didesak segera audit potensi kerugian negara.

PONTIANAK. Penghentian proses hukum oleh Kejati Kalbar dalam kasus Riam Merasap Ketapang sangat disayangkan berbagai pihak. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Wilayah Kalbar diminta menjalankan kewenangannya melakukan audit terhadap kerugian keuangan negara.

"Kalau memang BPKP sudah

melakukan audit fisik proyek, kita minta BPK melakukan audit kerugian keuangan negara agar jelas persoalannya. Sehingga tidak ada lagi pertanyaan soal mega proyek ini," tegas Thomas Aleksander SSos, anggota DPRD Kalbar Dapil Ketapang-KKU kepada Equator, Senin (20/6).

Menurutnya, megaprojek yang menelan Rp 135 miliar itu sudah delapan tahun itu terbengkalai. Kalau tidak ada masalah kenapa airnya tidak mengalir. Apakah konsultan teknis atau konsultan perencanaan yang salah, atau memang dari segi pelaksanaan proyeknya yang salah.

"Ketika saya turun ke lokasi, dari segi pengambilan sumber air saja sudah salah. Karena air yang diambil itu tekanannya tidak baik, di Km 12-Siduk. Sehingga, dilakukan drain pompa. Untuk mendorong setiap be-

berapa 10 km dilakukan drain pompa agar airnya mengalir, tapi itukan tidak bias berjalan, pendorong air kan bukan hal gampang. Membutuhkan listrik 24 jam," ujar Thomas.

Thomas menyesalkan penghentian proses hukum kasus tersebut. Pihak Kejati seharusnya lebih teliti dalam menangani kasus tersebut. "Kita minta SP3 ditinjau ulang, untuk itu perlu ada audit dari BPK, kalau hasil audit BPK ada pelanggaran, ya ditindak tegas," kata legislator PDI Perjuangan ini.

Apalagi, kata Thomas, pihak Kejati Kalbar dalam penanganan kasus tersebut baru sebatas pengumpulan bahan keterangan, belum masuk kepada tahap penyelidikan dan penyidikan. "Bahkan belum ada satupun pihak yang dimintai keterangan oleh pihak Kejati. Ada apa ini," tanya dia.

Selain itu, Thomas juga meminta kepada Kejati Kalbar menjelaskan secara rinci langkah-langkah yang sudah dilakukan kejaksaan, mulai dari pelaksanaan proyek sampai kepada hasil audit BPKP Kalbar.

"Pihak Kejati menyebutkan kesimpulan audit investigatif yang dilakukan BPKP belum menemukan indikasi kerugian Negara. Dan karena dasar itulah pihak kejaksaan menghentikan proses hukumnya. Artinya kesimpulan itu masih belum, bukan tidak menemukan indikasi kerugian. Karena itu, pihak kejaksaan diminta untuk meminta BPK Perwakilan Kalbar melakukan audit," pungkasnya.

Anggota DPRD Kalbar Daerah Pemilihan Ketapang-KKU, H Miftah kepada Equator (20/6) tadi malam mengatakan

■ Halaman 7

Tinjau Ulang

.... . dari halaman 1

terlepas salah atau tidak pihaknya berharap mengedepankan asas praduga tak bersalah. "Kalau memang yakin ini dikorupsi, harus dibuktikan letak kesalahannya," tegas Miftah.

Miftah mengaku tidak akan memihak siapapun dalam proyek tersebut. Hanya saja ia berharap masalah ini tidak menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat Kalbar, khususnya masyarakat Ketapang.

"Kita sepakat proyek itu harus benar-benar berguna untuk masyarakat. Artinya, kalau anggaran APBD dari dana masyarakat sudah dipergunakan untuk membangun proyek itu, maka proyek tersebut harus berguna untuk masyarakat juga," tutur Miftah.

Jika ada kesalahan dalam proyek tersebut, Miftah setuju agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun ia berharap masing-masing pihak bisa melihat persoalan ini secara jernih, dan tidak menyalahkan orang

tertentu tanpa bukti dan fakta yang nyata.

"Intinya, jika memang benar ada korupsi, pelakunya harus ditindak. Sebaliknya, jika memang proyek itu tidak bermasalah, harus kita hormati juga keputusan yang sudah diambil aparat hukum," serunya.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu berharap aparat hukum juga mesti serius menangani persoalan ini. Khusus persoalan audit, ia mengingatkan agar dilakukan secara teliti dan cermat. "Ini penting untuk memberikan rasa keadilan kepada semua pihak, baik masyarakat maupun pengerjaan proyek," pungkas Miftah.

Seperti diketahui, proyek Riam Merasap di Ketapang pernah diproses Kejati Kalbar. Namun proses yang dilakukan tidak sampai tahap penyelidikan apalagi sampai penyidikan. Proses hukum kasus itu dihentikan hanya sampai tahap pengumpulan bahan keterangan alias Pulbaket.

Alasan Kejati menghentikan

kasus tersebut karena mengikuti hasil audit yang dilakukan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menyimpulkan belum menemukan kerugian Negara. Kondisi ini pun menimbulkan banyak tanda tanya.

Upaya Equator untuk meminta kejelasan soal audit tersebut ke BPKP kandas. "Pak Asol, sedang ke Jakarta. Jadi kita belum bisa memberikan keterangan," ujar Hermansyah, Kepala Sub Bagian Umum BPKP Kalbar dijumpai Equator di kantornya, kemarin.

Asol menjabat sebagai Kepala Bidang Investigasi BPKP Kalbar. Bidang ini lah yang bisanya menangani persoalan audit terhadap penggunaan keuangan Negara di lingkungan Pemda se-Kalbar.

"Saya tidak tahu apakah BPKP pernah melakukan audit terhadap proyek Riam Merasap. Nanti nunggu Pak Asol pulang penataran dari Jakarta saja. Dua atau tiga hari kedepan boleh kembali," saran Hermansyah. (jul/bdu)